

PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MUHAMMAD FIRYAL

NPP. 31.0315

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Program Studi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan

email : muhammadfiryal24@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Maisondra, SH, MH, M.Pd, Dipl.Ed, M.A.P

ABSTRACT

Background (GAP): The financial independence ratio of Way Kanan Regency is still relatively low. Specific indicators include a decentralization degree ratio of 5.18% (categorized as very insufficient), a dependency degree ratio of 70.6% (categorized as very high dependency), and a financial independence ratio of 6.75% (categorized as instructive). The inhibiting factors in increasing Regional Original Revenue include the lack of effort by the Regional Financial and Asset Management Agency in increasing regional revenue, regulations governing Regional Original Revenue that are not sufficiently binding, and the low contribution of Regional-Owned Enterprises. **Objective:** This research aims to examine the contribution of Regional Original Revenue in supporting the financial independence of Way Kanan Regency, identify the inhibiting factors, and the efforts made to enhance this financial independence. **Method:** This research employs a qualitative method with a descriptive approach, using financial ratio analysis theory: Degree of Decentralization, Degree of Dependency, and Degree of Independence (Mahmudi 2019). Data collection was carried out through semi-structured interviews and documentation techniques. **Results/Findings:** The results of the research show that the financial independence ratio of Way Kanan Regency is still relatively low, with a decentralization degree ratio of 5.18% categorized as very insufficient, a dependency degree ratio of 70.6% categorized as very high dependency, and a financial independence ratio of 6.75% categorized as instructive. **Conclusion:** To address these issues, the Regional Financial and Asset Management Agency of Way Kanan Regency strives to increase Regional Original Revenue through socialization to the community about the importance of paying taxes and understanding the concept of regional financial independence, drafting precise regulations related to Regional Original Revenue, and optimizing the management of Regional-Owned Enterprises.

Keywords: Financial Independence, Financial Dependency, Regional Original Revenue

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih tergolong rendah yaitu, rasio derajat desentralisasi sebesar 5,18% pada kriteria yang terbilang sangat kurang, rasio derajat ketergantungan sebesar 70,6% pada kriteria ketergantungan dengan kategori sangat tinggi, dan rasio kemandirian keuangan sebesar 6,75% pada kriteria yaitu instruktif. Faktor-

faktor penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu, rendahnya upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, regulasi yang mengatur Pendapatan Asli Daerah belum cukup mengikat, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah masih rendah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Way Kanan, faktor-faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan analisis rasio teori keuangan: Derajat Desentralisasi, Derajat Ketergantungan, dan Derajat Kemandirian (Mahmudi 2019:141-143). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan masih tergolong rendah yaitu, rasio derajat desentralisasi sebesar 5,18% pada kriteria yang terbilang sangat kurang, rasio derajat ketergantungan sebesar 70,6% pada kriteria ketergantungan dengan kategori sangat tinggi, dan rasio kemandirian keuangan sebesar 6,75% pada kriteria yaitu instruktif. **Kesimpulan:** Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, menyusun regulasi yang cermat terkait Pendapatan Asli Daerah, dan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem pemerintahannya, terutama karena pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mendistribusikan wewenangnya kepada pemerintah daerah, memberikan mereka keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah (Nasir, 2019).

Menurut Maisondra (2022:68), "Paling tidak ada tiga potensi negara kita Indonesia yang dapat kita banggakan, yakni: Potensi Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Faktor Sejarah". Potensi Wilayah yang dimiliki yaitu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia. Indonesia menjadi lalu lintas persimpangan dunia dan titik persilangan perekonomian global. Hanya segelintir negara di dunia yang memiliki letak strategis seperti Indonesia. Selain itu, letak geografis ini juga berpengaruh pada kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki. Indonesia merupakan negara dengan flora terbanyak di dunia, bahkan mengalahkan Amerika yang memiliki wilayah lima kali lebih luas (Sondakh et al., 2019).

Pemerintah pusat berfokus pada pemberian otonomi kepada daerah, yang terbukti melalui evaluasi rutin yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi dan terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan daerah pada dana yang berasal dari pemerintah pusat (Andriani & Wahid, 2019).

Menurut Halim (2002:167), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengadministrasikan dan menggunakan sumber daya keuangan internalnya secara efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, banyak daerah masih sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, yang tercermin dari tingkat PAD yang relatif rendah (Dian Latief Mukti et al., 2015).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hak dan kewajiban daerah, termasuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian mereka, seperti mengenakan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini memberikan imbalan atau balasan secara tidak langsung, dengan tujuan utama untuk membiayai fasilitas-fasilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah sangat terkait dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola PAD. Apabila Pemerintah Daerah mampu mencapai PAD yang signifikan dan tidak terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut dianggap memuaskan. Sebagai pemegang kendali dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Semua ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Tugas kepala daerah dalam hal pengelolaan keuangan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Wilayah.

Umumnya, PAD didominasi oleh penerimaan pajak daerah. Di tengah era otonomi daerah seperti saat ini, peran daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara menjadi sangat krusial. Bahkan, pemerintah daerah saling bersaing untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. Mekanisme alokasi dan distribusi menjadi faktor utama dalam menentukan sejauh mana anggaran akan direpatriasi kepada Pemerintah Daerah. Namun, perlu diingat bahwa tuntutan untuk meningkatkan PAD memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, Nuryadin Ali Mustopa, kepada RRI pada Rabu (01/03/2023), menjelaskan bahwa PAD di Kabupaten Way Kanan belum tergali secara optimal, meskipun Kabupaten Way Kanan termasuk terluas ketiga di Provinsi Lampung. "PAD kita di Way Kanan masih tergolong rendah, sebab beberapa faktor diantaranya banyak objek pajak yang belum terdata, kemudian masih rendahnya nilai jual objek pajak (NJOP) dan kurangnya update dari data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah" (Heriyanto, 2023).

Menurut data dari website BAPENDA Kabupaten Way Kanan (<https://bapenda.waykanankab.go.id/>), Kabupaten Way Kanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, terutama dari sektor retribusi dan pajak. Dari 11 jenis pajak daerah yang ada, terdapat dua jenis pajak yang belum dapat diterapkan secara optimal, yaitu pajak keramaian dan pajak sarang burung walet, karena masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan jenis pajak tersebut.

Hal ini menyebabkan potensi peningkatan pendapatan dari pajak daerah tidak dapat dimaksimalkan dalam praktiknya (Bapenda Way Kanan, 2019).

Dana transfer ke daerah adalah instrumen transfer kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan berasal dari Dana Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahun dalam anggaran. Jumlah Dana Transfer ini bervariasi dari tahun ke tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah demi kesejahteraan rakyat.

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah Dana Transfer yang diterima oleh Kabupaten Way Kanan:

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2019	62.353.560.983,81	990.355.064.471,00	61.453.814.100,00
2020	64.617.681.616,75	883.983.659.212,00	70.579.063.230,00
2021	70.125.340.980,24	899.917.820.593,00	61.734.644.661,50
2022	77.242.579.541,44	969.060.230.917,00	372.232.210,00

Sumber: Kemenkeu RI (2023)

Tabel di atas menggambarkan bahwa terjadi ketimpangan antara jumlah PAD yang diperoleh dibandingkan dengan Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan serapan PAD secara optimal serta menunjukkan kinerja yang belum maksimal dalam mengelola potensi daerahnya. Sementara itu, pendapatan lainnya yang berasal dari sumber-sumber lain juga berperan penting dalam mendukung anggaran daerah, namun upaya untuk meningkatkan PAD harus tetap menjadi prioritas utama dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang optimal akan berdampak pada kemandirian finansial daerah serta kemampuan dalam pembiayaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berinovasi dan mencari terobosan baru dalam meningkatkan PAD, baik melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, maupun pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi "Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Way Kanan", mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang ada, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem pemerintahan, terutama melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan potensinya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, mempercepat pembangunan, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam wilayah,

jumlah penduduk, dan faktor sejarah, banyak daerah masih menghadapi kesenjangan dalam pelaksanaan otonomi ini.

Salah satu indikator utama dari kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Halim (2002) menyatakan bahwa tingkat kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, banyak daerah di Indonesia masih sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, yang tercermin dari rendahnya tingkat PAD. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mendukung kemandirian, seperti mengenakan pajak dan retribusi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan potensi ini.

Contoh nyata dari kesenjangan ini dapat dilihat di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Meskipun memiliki potensi besar, PAD di Kabupaten Way Kanan masih tergolong rendah. Menurut Nuryadin Ali Mustopa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya objek pajak yang belum terdata, rendahnya nilai jual objek pajak (NJOP), dan kurangnya update data pajak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Data dari website BAPENDA Kabupaten Way Kanan menunjukkan bahwa dua jenis pajak daerah, yaitu pajak keramaian dan pajak sarang burung walet, belum dapat diterapkan secara optimal.

Tabel dari Kementerian Keuangan RI (2023) menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara PAD yang diperoleh dengan Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan serapan PAD secara optimal dan menunjukkan kinerja yang belum maksimal dalam mengelola potensi daerahnya. Upaya untuk meningkatkan PAD harus tetap menjadi prioritas utama dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, inovasi dan terobosan baru dalam pengelolaan potensi daerah sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah demi kesejahteraan rakyat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Way Kanan:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penelitian yang dilakukan oleh Ashary U., Menne F., dan Abduh T. (2023) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap UMKM, pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap UMKM, serta dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap UMKM dan kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, PAD berpengaruh signifikan terhadap UMKM dan kemandirian keuangan daerah. Namun, UMKM tidak mampu memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD cenderung memperbaiki kemandirian keuangan daerah, dan oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk fokus pada peningkatan PAD dan mendorong sektor UMKM (Ashary et al., 2023).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian oleh Ramadhan M., Kustiawan M., dan Fitriana (2022) menggunakan analisis kuantitatif untuk mengkaji pengaruh PAD, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Barat. Studi ini menggunakan laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota selama periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan daerah, dengan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisisnya (Ramadhan et al., 2022).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu)

Penelitian yang dilakukan oleh Gaghana R.L., Kindangen P., dan Rotinsulu D.C. (2019) bertujuan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah di empat kota di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk panel data dari tahun 2007 hingga 2016 dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara PAD memiliki pengaruh signifikan. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah tersebut (Gaghana et al., 2019).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon

Penelitian oleh Tolosang K.D. (2018) menyoroti pentingnya kemandirian keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah yang dicanangkan sejak tahun 2001. Studi ini fokus pada Kota Tomohon dan menggunakan analisis regresi untuk mengukur pengaruh pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, sementara PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, menekankan pentingnya peningkatan PAD untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik (Tolosang, 2018).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian oleh (Bella, 2022) mengkaji bagaimana PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Studi ini menggunakan data panel dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan menemukan bahwa baik PAD maupun dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dana perimbangan, menunjukkan pentingnya optimalisasi PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah .

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Studi oleh (Fahriza & Riswati, 2023) meneliti hubungan antara pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah dan pada gilirannya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menekankan pentingnya manajemen keuangan yang efektif untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik .

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Nur'ainy et al., 2013) berfokus pada pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Studi ini menyarankan perlunya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Penelitian oleh (Suryani, 2019) mengevaluasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan data panel dan analisis regresi, studi ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian oleh (Erawati & Suzan, 2015) menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah. Menggunakan data panel dari berbagai daerah di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, efek DAU lebih dominan dibandingkan DAK, yang menunjukkan pentingnya alokasi yang tepat dari dana transfer untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Studi oleh (Kristina et al., 2021) mengkaji hubungan antara kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah yang lebih mandiri secara finansial cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menekankan pentingnya peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun otonomi daerah telah diterapkan selama lebih dari dua dekade, masih terdapat banyak tantangan dalam penerapannya secara efektif, terutama terkait dengan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD di daerah-daerah tertentu, seperti Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan utama seperti kurangnya data objek pajak yang akurat dan rendahnya nilai jual objek pajak (NJOP), tetapi juga menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembaruan data pajak secara berkala dan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Kebaruan lainnya adalah penekanan pada pentingnya peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi PAD melalui strategi-strategi yang lebih kreatif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai pengelolaan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan. Melalui penelitian ini, akan dipelajari secara mendalam mengenai faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan PAD di daerah tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk memahami upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber utama pendapatan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang kontribusi PAD dalam konteks kemandirian keuangan daerah, tetapi juga akan membuka ruang diskusi mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam optimalisasi PAD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mencapai kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dalam konteks kemandirian keuangan daerah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang kompleks dan mendalam terkait dengan PAD, seperti sumber pendapatan, ketergantungan keuangan, dan upaya menuju kemandirian keuangan (Arikunto, n.d.).

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan beberapa instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara, checklist dokumen, dan observasi. Pedoman wawancara digunakan dalam wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan seperti Kepala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan. Checklist dokumen digunakan untuk mendokumentasikan data-data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen terkait lainnya. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari situasi atau kegiatan terkait PAD di lapangan (L.J Moleong, 2022).

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait seperti Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Aset, dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan BPKAD Kabupaten Way Kanan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan (Mungin, 2012).

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mengorganisir, merangkum, dan menginterpretasi data-data yang telah terkumpul. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi PAD Kabupaten Way Kanan dan dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah (Sugiyono, 2015).

Dengan menggunakan metode dan teknik penelitian yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang kemandirian keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Way Kanan. Analisis data yang dilakukan juga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik keuangan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan

Hasil penelitian yang peneliti teliti dalam skripsi berjudul “Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan” menunjukkan bahwa tingkat

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang teridentifikasi dalam penelitian. Pertama, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum optimal dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, regulasi terkait belum memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku penyelewengan proses pemungutan PAD. Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum dikelola dengan baik, mengakibatkan kesulitan dalam mencapai kemandirian keuangan.

Berbicara tentang pengelolaan PAD, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan menekankan bahwa semua pihak terlibat dalam proses tersebut. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bertanggung jawab sebagai pengelola PAD secara teknis, sedangkan BPKAD bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan Inspektorat mengawasi. Kerja sama antara ketiga lembaga ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

Analisis data menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Way Kanan masih rendah karena kurangnya potensi sumber PAD di daerah tersebut. Salah satu potensi terbesar yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, praktik-praktik curang dalam pemungutan pajak turut menyebabkan pendapatan pajak tidak maksimal.

Selain dari pendapatan pajak, potensi retribusi daerah juga belum dimanfaatkan secara optimal. Praktik-praktik curang dan pemungutan tidak sesuai harapan juga terjadi di sektor ini. Semua ini mengakibatkan ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer dari pusat.

Rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD juga menjadi faktor yang menyebabkan kemandirian keuangan daerah rendah. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD, seperti optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penyusunan regulasi yang cermat, serta pengelolaan BUMD yang lebih efektif.

Melihat data perbandingan antara PAD dan Belanja Daerah, terlihat bahwa PAD Kabupaten Way Kanan masih rendah. Ini berdampak pada pengelolaan APBD yang terbatas dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PAD guna mendukung kemandirian keuangan daerah.

Dalam konteks derajat desentralisasi, ketergantungan Kabupaten Way Kanan pada dana transfer dari pusat dapat diukur melalui rasio derajat desentralisasi. Perbandingan antara PAD dan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap TPD, yang mencerminkan derajat kemandirian keuangan daerah.

Derajat ketergantungan keuangan daerah merupakan sebuah parameter penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan suatu daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar suatu daerah bergantung pada sumber pendapatan eksternal, khususnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Perhitungan rasio ini dapat dilakukan dengan membagi pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah, lalu hasilnya

dikalikan dengan 100%. Rumus tersebut memberikan indikasi seberapa besar proporsi pendapatan daerah yang berasal dari sumber eksternal.

Pendapatan transfer merupakan sumber dana yang sangat berperan dalam mendukung fungsi operasional dan pembangunan di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari data target dan realisasi pendapatan transfer Kabupaten Way Kanan selama periode tahun 2019-2022. Meskipun terjadi fluktuasi, pendapatan transfer Kabupaten Way Kanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Way Kanan pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatannya.

Total pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan juga mengalami peningkatan selama periode yang sama, meskipun dengan fluktuasi yang lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer. Total pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan sumber pendapatan lainnya. PAD sendiri masih dianggap rendah, menandakan bahwa Kabupaten Way Kanan masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dan sumber pendapatan eksternal lainnya.

Selain itu, analisis rasio kemandirian keuangan daerah juga penting untuk dipertimbangkan. Rasio ini menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan tanpa terlalu tergantung pada sumber pendapatan eksternal. Rasio kemandirian yang rendah dapat mengindikasikan tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer dan pinjaman daerah.

Pendapatan eksternal daerah Kabupaten Way Kanan terdiri dari transfer pusat, transfer provinsi, dan pinjaman daerah. Transfer pusat dan provinsi serta pinjaman daerah menjadi komponen penting dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah, namun tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber eksternal ini dapat menimbulkan risiko jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan sangat penting untuk dipahami dalam konteks perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menguraikan bahwa PAD mencakup berbagai sumber pendapatan, namun upaya untuk meningkatkannya sering kali terkendala oleh beberapa faktor krusial.

Salah satu faktor utama adalah rendahnya upaya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan PAD. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terkait pemahaman akan pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah. Regulasi terkait pemungutan pajak dan retribusi juga belum memberikan dampak signifikan, terutama dalam hal pajak keramaian dan pajak sarang burung walet yang memiliki potensi namun belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Selain itu, masih ada penyelewengan dalam

pemungutan PAD yang menghambat pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Kurangnya kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu faktor penghambat. BUMD diharapkan dapat menjadi penyumbang utama PAD, namun kenyataannya kontribusinya masih belum optimal. Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat juga mengurangi kemandirian keuangan daerah.

3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan

Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan PAD meliputi optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyusunan regulasi yang lebih ketat, dan pengelolaan BUMD yang lebih efektif. Namun, perlu adanya langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Pemerintah daerah perlu menggali potensi secara maksimal dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah. Regulasi yang lebih tegas juga perlu disusun untuk menjamin efektivitas pemungutan PAD dan mengurangi penyelewengan. Pengelolaan BUMD juga harus dioptimalkan dengan kerja sama lintas sektor dan eksplorasi potensi baru yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan dapat meningkat secara signifikan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah, dan mewujudkan kemandirian keuangan yang diinginkan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menjadi krusial dalam mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa temuan utama yang menjadi fokus pembahasan:

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi faktor utama yang menghambat pemungutan PAD. Meskipun potensi pajak keramaian dan pajak sarang burung walet cukup besar, namun peningkatan pemungutan masih terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.

Kedua, regulasi terkait pemungutan PAD belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terutama terlihat dalam penyelewengan pemungutan PAD yang masih terjadi. Perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan efektif untuk menjamin pemungutan PAD berjalan dengan baik dan mengurangi potensi penyelewengan.

Ketiga, kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum optimal. Meskipun diharapkan menjadi penyumbang utama PAD, namun kenyataannya kontribusinya masih terbatas. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan PAD.

Diskusi temuan utama ini menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan PAD. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penghambat dan temuan utama, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi tantangan peningkatan PAD di daerah tersebut.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Dalam diskusi temuan menarik, terdapat beberapa aspek yang patut diperhatikan terkait dengan faktor-faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan.

Pertama, kesadaran masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah merupakan titik penting. Meskipun sudah ada potensi besar dalam pajak keramaian dan pajak sarang burung walet, namun masih ada kesenjangan dalam pemahaman masyarakat. Meningkatkan kesadaran ini dapat menjadi kunci untuk memperbaiki pemungutan PAD. Kedua, regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk menghindari penyelewengan dan memastikan pemungutan PAD berjalan efektif. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah. Ketiga, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD. Strategi-strategi baru perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi lokal yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan menarik ini, pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dapat merancang langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD dan mencapai kemandirian keuangan yang diinginkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan, disimpulkan bahwa pengelolaan PAD masih jauh dari optimal. Meskipun PAD berasal dari berbagai sumber yang sah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset, kontribusinya masih rendah dalam mencapai kemandirian keuangan daerah.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat utama termasuk rendahnya upaya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, regulasi yang belum cukup mengikat, serta kontribusi yang minim dari Badan Usaha Milik Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penyusunan regulasi yang cermat, dan optimalisasi pengelolaan BUMD masih belum mampu memberikan dampak signifikan dalam peningkatan PAD.

Sebagai saran, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan PAD. Kedua, perlu penyusunan regulasi yang lebih cermat dan efektif untuk memastikan pungutan PAD berjalan optimal dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyelewengan. Terakhir, pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan dengan kerja sama lintas sektor dan eksplorasi potensi daerah yang belum

termanfaatkan sepenuhnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PAD dapat meningkat secara signifikan dan mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Way Kanan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi hasil dan kesimpulan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten Way Kanan, sehingga generalisasi temuan untuk daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya mungkin membatasi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil. Kemudian, penelitian ini juga mungkin terbatas dalam menggali perspektif yang lebih luas dari berbagai stakeholder terkait Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional juga dapat memengaruhi ketersediaan data dan interpretasi hasil. Terakhir, penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak melibatkan analisis kausal yang mendalam, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya secara lebih efektif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian ini, beberapa hal dapat menjadi fokus yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penelitian lanjutan dapat melibatkan studi komparatif antara Kabupaten Way Kanan dengan daerah lain untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta keberhasilan upaya-upaya peningkatannya. Kedua, pengembangan model prediktif atau analisis regresi untuk mengevaluasi dampak variabel-variabel tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi langkah yang lebih mendalam dalam memahami dinamika keuangan daerah. Selain itu, studi longitudinal yang melacak perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai tren dan pola yang muncul. Selanjutnya, inklusi perspektif lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, pengusaha, dan akademisi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terakhir, penelitian mengenai efektivitas berbagai kebijakan dan strategi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah juga merupakan bidang yang menarik untuk dieksplorasi guna memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan berbasis bukti bagi pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang.

Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 – 2015). *JURNAL AKUNTANSI*, 13(1). <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708>
- Arikunto, S. (n.d.). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi.
- Ashary, U. M., Menne, F., & Abduh, T. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MELALUI UMKM DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3806>
- Bella, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(05). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i5.562>
- Dian Latief Mukti, M., Makmur, M., & Adiono, R. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Barat Sungai Brantas Kota Kediri Sebagai Destinasi Pariwisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kawasan Objek Wisata Selomangleng Kota Kediri). In *JAP* (Vol. 3, Issue 11).
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDUNG. *E-Proceeding of Management*, 3(3).
- Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2). <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732>
- Gaghana, R. L., Kindangen, P. ., & Rotinsulu, D. Ch. (2019). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KOTA MANADO, KOTA BITUNG, KOTA TOMOHON DAN KOTA KOTAMOBAGU). *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.19898.19.7.2018>
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. DJ. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Mungin, B. (2012). Metode Penelitian Kualitatif: Akulturasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. In *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*.
- Nasir, M. S. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADEOTONOMI DAERAH. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nur'ainy, R., Desfitriana, & Utomo, R. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota Di Jawa Barat. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Teknik Sipil)*, 5.
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>

- Sondakh, R. W., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2019). Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Suryani, I. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2). <https://doi.org/10.34010/jra.v11i2.2673>
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).

